

339.41

RUN

2

21

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH**



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

DARU KUNCORO
C4B001117

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDAIP

TESIS
ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

disusun Oleh

Daru Kuncoro
C4B001117

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 11 April 2001
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

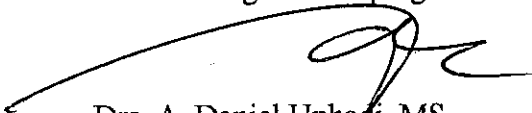
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Drs. Wiratno, M.Ec

Pembimbing Pendamping

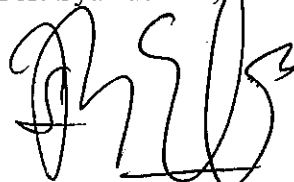


Drs. A. Daniel Uphadi, MS

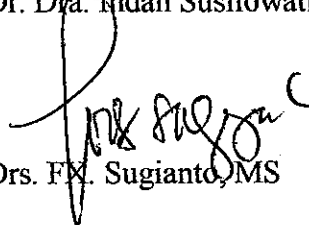
Anggota Penguji



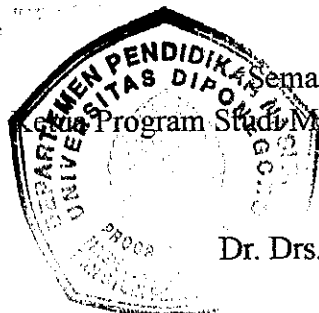
Dr. Drs. Syafrudin B, SU



Dr. Dra. Indah Susilowati, MSc



Drs. FX. Sugianto, MS



Semarang,
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. Drs. Syafrudin Budiningharto, SU

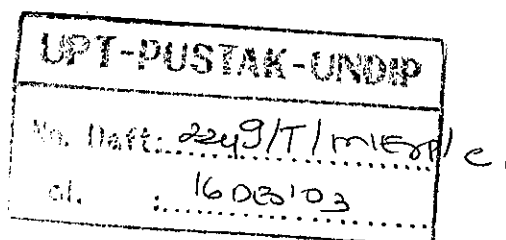
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang,



Daru Kuncoro, SE



ABSTRACT

This research is motivated by the fact that the regency and city development has little support from its regional revenue (PAD) in autonomy implementation. This has been shown by the research findings that Fiscal Decentralization Degree for all of regencies and cities in Central Java is relatively below 20%. On the other hand, the local government efforts in generating revenues from taxes and retributions are still far from its capacity. This implies that the dependency rate of regencies and cities to central government is still high. Therefore, local governments are demanded to intensify and explore their own income sources in order to reduce it.

The objective of the research is to analyze the variables influencing the regency and city revenues in Central Java Province. The variables used in this research cover development expenditure and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita. This research makes use of the 2001 cross sectional data and utilizes Ordinary Least Square Multiple Regression Analysis. Then, the analysis was done that included classic assumption test, economic analysis and statistic test.

The findings of the research suggest that the variables of development expenditure and GRDP per capita give positive impacts on generating the regional revenues of regencies and cities in Central Java.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimotivasi dari kenyataan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi, sejauh ini kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah kurang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah berada di bawah 20% meskipun mobilitas dalam penarikan pajak dan retribusi masih jauh dari kapasitasnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten/kota dituntut agar dapat menggali sumber-sumber pendapatannya untuk mengurangi ketergantungannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Variabel-variabel yang digunakan meliputi : pengeluaran pembangunan (PP) dan PDRB perkapita (PKT). Data yang digunakan adalah data kerat lintang tahun 2001 dan diuji dengan alat analisis regresi berganda. Selanjutnya dilakukan analisis yang meliputi uji asumsi klasik, ekonomi dan statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pembangunan dan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan perkenanNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH”. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

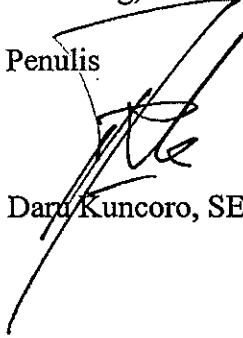
Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Drs. Wiratno, MEc, selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian ini dibuat.
2. Drs. Daniel Uphadi, MS, sebagai Pembimbing Tesis yang dengan penuh pengertian telah memberikan arahan dalam penulisan ini.
3. DR. Indah Susilowati, MSc; Drs. Edy Yusuf AG, MSc; DR. Syafrudin, SU dan Drs. FX. Sugiyanto, MS yang dengan penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan bimbingan dan arahan yang jelas dan bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
4. Staf pengajar Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal pada Program Strudi MIESP Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
5. Bapak, Istriku dan semua saudaraku atas dukungan moral serta curahan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Semoga segala kebbaikannya memperoleh imbalan yang sepadan dari Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi tata bahasa, metodologi, maupun segi kedalaman analisisnya. Oleh karena itu segala saran dan kritik akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya segala kebenaran yang terkandung di dalam tulisan ini semata-mata hanyalah berkat kemurahanNya dalam menuntun penulis menuju kebenaran. Sedangkan segala kesalahan yang ada, sepenuhnya bersumber dan menjadi tanggungjawab penulis.

Semarang,

Penulis


Daru Kuncoro, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	8
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	10
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. Sumber penerimaan daerah	11
2.1.2. Indikator desentralisasi fiskal daerah	13
2.1.3. PDRB per kapita	15
2.1.4. Pengeluaran Pembangunan	17
2.2. Penelitian terdahulu	18
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	22
2.4. Hipotesis	23
2.5. Definisi Operasional	23
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis dan Sumber Data	25
3.2. Teknik Analisis	25
3.2.1. Deskriptif Statistik	25
3.2.1. Analisis Regresi	26
BAB IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	30
4.1. Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam	30
4.2. Kondisi Ekonomi	31
4.3. Keuangan Daerah	36
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1. Analisis Deskriptif (Derajat Desentralisasi Fiskal)	41
5.2. Analisis Regresi	50

BAB VI. PENUTUP	57
6.1. Simpulan	57
6.2. Saran	59
6.3. Limitasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Realisasi dan Distribusi Persentase Penerimaan Daerah Kabupaten/kota se Indonesia Tahun 1998/1999 s/d 2000 ...	5
Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Seluruh Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998/1999 s/d 2000	6
Tabel 4.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999-2001	32
Tabel 4.2. Distribusi Persentase PDRB Tahun 1999-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	33
Tabel 4.3. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1999-2001	35
Tabel 4.4. Rekapitulasi Penerimaan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000-2001	37
Tabel 4.5. Prosentase Anggaran Rutin dan Pembangunan Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000-2001	39
Tabel 5.1. Rekapitulasi Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 1999/2000-2001	42
Tabel 5.2. Rekapitulasi Anggaran Sisa Lebih Tahun Sebelumnya Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1999/2000-2001	44
Tabel 5.3. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap PAD tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 (dalam persen)	45
Tabel 5.4. Hasil Analisis Regresi Model Empiris	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka pemikiran teoritis	22
Gambar 5.1. Statistik d Durbin-Watson	51

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|-----|---|
| Lampiran | 1. | Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 |
| Lampiran | 2. | Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Rutin dan Pembangunan 1999/2000 – 2001. |
| Lampiran | 3. | Hasil Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999/2000 |
| Lampiran | 4. | Hasil Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 |
| Lampiran | 5. | Hasil Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 |
| Lampiran | 6. | Persentase Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999 |
| Lampiran | 7. | Persentase Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 |
| Lampiran | 8. | Persentase Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 |
| Lampiran | 9. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Cilacap |
| Lampiran | 10. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Banyumas |
| Lampiran | 11. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Purbalingga |
| Lampiran | 12. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Banjarnegara |
| Lampiran | 13. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Kebumen |
| Lampiran | 14. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Purworejo |
| Lampiran | 15. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Wonosobo |
| Lampiran | 16. | Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Magelang |

Lampiran	17.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Boyolali
Lampiran	18.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Klaten
Lampiran	19.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Sukoharjo
Lampiran	20.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Wonogiri
Lampiran	21.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Karanganyar
Lampiran	22.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Sragen
Lampiran	23.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Grobogan
Lampiran	24.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Blora
Lampiran	25.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Rembang
Lampiran	26.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Pati
Lampiran	27.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Kudus
Lampiran	28.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Jepara
Lampiran	29.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Demak
Lampiran	30.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Semarang
Lampiran	31.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Temanggung
Lampiran	32.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Kendal
Lampiran	33.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Batang
Lampiran	34.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Pekalongan
Lampiran	35.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Pemasang
Lampiran	36.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Tegal
Lampiran	37.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kabupaten Brebes
Lampiran	38.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kota Magelang
Lampiran	39.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kota Surakarta

Lampiran	40.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kota Salatiga
Lampiran	41.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kota Semarang
Lampiran	42.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kota Pekalongan
Lampiran	43.	Hasil Analisis Pajak dan Retribusi Kota Tegal
Lampiran	44a.	Hasil Estimasi Regresi Model Empiris
Lampiran	44b.	Hasil Estimasi Regresi Parsial (PP, PKT)
Lampiran	45a.	Hasil Estimasi Regresi Parsial (PKT, PP)
Lampiran	45b.	Uji White Heteroskedasticity (no cross term)
Lampiran	46.	Uji White Heteroskedasticity (cross term)
Lampiran	47.	Koefisien Location Quotient (LQ) Sektor-sektor PDRB Menurut Harga Konstan 1993 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Salah satu masalah dan tantangan dalam proses pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan daerah yang masih merupakan masalah penting, mendesak dan serius. Biasanya, semakin dekat tingkat pemerintahan kepada masyarakat akan semakin sukar tugas menangani masalah-masalah pembangunan.

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ekonomi nasional. Program-program pembangunan daerah yang biasanya dibuat selaras dengan program pembangunan nasional, akan menyedatkan bagi penyusun strategi pembangunan daerah karena tiap-tiap daerah mempunyai ciri tersendiri. Karakteristik yang dimiliki daerah tersebut memerlukan strategi pembangunan sektoral tersendiri, tanpa mengurangi peran daerah tersebut atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan keserasian antar daerah.

Dengan kemampuan yang ada, maka pendekatan lintas sektor yang lebih terpadu dengan arahan spasial yang tepat, akan dapat mengembangkan pembangunan daerah menuju keseimbangan antar daerah dan kesatuan nasional melalui peningkatan kemampuan pembangunan daerah (Haeruman, 1996: 48).

Keberhasilan pembangunan yang dicapai Indonesia dalam peningkatan laju pertumbuhan, tidak terlepas dari keadaan keuangan negara dari kekayaan minyak tahun 1973/1974 dan 1979/1980. Dekade 1970-an itu ditandai dengan perubahan radikal dalam sistem fiskal seperti juga halnya dengan aspek-aspek perekonomian nasional yang lain. Minyak bumi mendominasi penerimaan pemerintah pusat hingga pada puncak *second oil shock* tahun 1981/1982, pendapatan minyak sama dengan 16% PDB, dan lebih dari 60% terhadap total anggaran pengeluaran (Booth, 1988: 65-78; Suparmoko, 2002: 15).

Dengan meningkatnya penerimaan Pemerintah Pusat, maka sebagian besar kegiatan pemerintah daerah dibiayai melalui asas dekonsentrasi dalam bentuk proyek sektoral. Namun untuk tahun 1990 jumlah bantuan menurun sekitar 40%, sehingga sebagian besar belanja pembangunan bergantung pada transfer.

Fluktuasi harga minyak dipasar internasional ini membawa dampak negatif terhadap penerimaan dan pengeluaran yang akhirnya mengait pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini menyebabkan kemampuan pemerintah pusat dalam pemberian bantuan dan subsidi mengalami penurunan. Sementara itu kebutuhan dan tuntutan pembangunan semakin meningkat seperti dikemukakan Peacock dan Wiseman, dengan meningkatnya GNP maka penerimaan pemerintah juga semakin meningkat seiring dengan pengeluarannya pemerintah (Guritno, 2001: 173). Dengan demikian pemerintah daerah harus berupaya mencari, mengusahakan dan menggali potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan yang makin kompleks.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan yang selama ini menitikberatkan hanya di pusat pemerintahan dan kurang memperhatikan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidak seimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi pembangunan di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi (Suparmoko, 2001: 32). Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam

menyelenggarakan pemerintah di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah : mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut siap untuk menerima beban dan tanggungjawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya bahwa Kabupaten/Kota didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan

penyerahan urusan pusat pada daerah. Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (UU Nomor 22 tahun 1999), dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Berikut ini adalah tabel struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia :

Tabel 1.1.
Realisasi dan Distribusi Persentase Penerimaan Daerah
Kabupaten/Kota se Indonesia Tahun 1999/2000 s/d 2001 (Milyar rupiah)

Uraian	1999/2000	2000	2001****
Sisa lebih tahun sebelumnya	1.062,38 (3,79%)	1.109,76 (3,85%)	503,61 (0,77%)
PAD	2.765,39 (9,88%)	2.491,94 (8,66%)	1.622,61 (2,47%)
Bagian Daerah**	3.324,92 (11,88%)	3.116,98 (10,83%)	2.379,89 (3,62%)
Dana Alokasi***	20.743,68 (74,09%)	21.950,35 (76,25%)	61.217,00* (93,09%)
Pinjaman Daerah	102,68 (0,37%)	119,18 (0,41%)	36,99 (0,06%)
Jumlah	27.999,05	28.788,21	65.760,10

Sumber : Nota Keuangan RAPBN, 2001, diolah.

Keterangan :
* DAU
** Bagi hasil pajak dan non pajak
*** Dana Alokasi adalah Subsidi Daerah Otonom (SDO) + Bantuan Pembangunan
**** Bagian informasi Keuangan Daerah Dep. Keu RI.
(.. %) Dari total penerimaan

Besarnya PAD tahun 1999/2000 adalah Rp. 2.765,39 milyar (9,88%), dan pada tahun 2001 hanya sebesar Rp. 1.622,61 milyar (2,47%). Sehingga dalam tiga tahun anggaran tersebut ada kecenderungan menurunnya PAD, sedangkan dana alokasi justru meningkat drastis. Kondisi yang sama juga terjadi di kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2.
 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota
 di seluruh Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999/2000 - 2001 (000)

Uraian	1999/2000	2000	2001
Sisa lebih tahun sebelumnya	137.890.718 (3,99%)	140.932.309 (4,18%)	221.023.927 (2,38%)
PAD	376.223.179 (10,88%)	359.547.823 (10,66%)	676.549.049 (7,29%)
Pendapatan yang berasal dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi.	2.923.821.128 (84,54%)	2.873.482.596 (85,17%)	7.952.942.564* (89,48%)
Pinjaman Daerah	20.671.998 (0,60%)	-	78.631.278 (0,85%)
Total penerimaan :	3.458.607.023	3.373.962.728	9.283.603.767

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, 1999/2000 - 2001, diolah

* Termasuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 (.. %) dari total penerimaan.

Melihat perbandingan antara total PAD tahun 1999/2000 (Rp. 376,22 milyar) dengan Pendapatan yang berasal dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi (Rp. 2.923,82 milyar), maka angka tersebut terlihat sangat timpang. Pada tahun 2000, angka ini semakin timpang apalagi terhadap tahun 2001 meskipun dana yang berasal dari pos ini semakin meningkat.

Keleluasaan dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, mendorong daerah untuk memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta obyek-obyek pajak dan retribusi yang baru. Dalam UU Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) menyebutkan tentang jenis pajak kabupaten/kota yang dapat ditetapkan dengan Perda selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah

daerah saling berlomba dalam menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan.¹

Adanya perbedaan kandungan/potensi sumber daya alam (SDA) pada tiap kabupaten/kota menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah sangat bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari angka-angka PDRB. Bagi daerah yang mempunyai cukup banyak kekayaan Sumber Daya Alam, maka penerimaan daerah akan banyak ditopang oleh SDA tersebut. Sebaliknya, maka persoalan kesulitan dana akan terjadi pada daerah yang miskin SDA.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, justru berimplikasi menciptakan *horizontal imbalance*, disamping mengurangi *vertical imbalance* (Sugiyanto, 2000: 4). Kemungkinan terjadinya *horizontal imbalance* tersebut sudah diantisipasi dengan DAU, sehingga kekurangan dana yang dialami daerah yang miskin SDA akan ditutup dengan DAU tersebut.

Menurut Sugiyanto (2000), masalah esensial dalam penentuan DAU ini sangat mungkin terjadi, karena patokan atau dasar penentuannya masih belum matang. Variabel-variabel apa saja yang harus diperhitungkan, karena hal ini sangat rawan dengan unsur subyektivitas dari penentu DAU, mengingat masing-masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri.

¹ Dari 1.053 Perda yang telah diinventarisasi Departemen Dalam Negeri, sebanyak 68 dari 105 Perda diduga bermasalah dan telah direkomendasikan oleh Tim Kerja Pengkajian Perda dan Keputusan Kepala Daerah Depdagri untuk dicabut. Ada berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi yang perlu dikaji dalam Perda tersebut, yang belakangan dinilai menghambat perkembangan dunia usaha dan investasi.

1.2. Perumusan Masalah

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalahannya proporsi penerimaan yang berasal dari PAD kabupaten/kota jumlahnya kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah antara kemampuan dengan kebutuhan.

Kondisi inilah yang telah menciptakan ketergantungan pemerintah kabupaten/kota pada pemerintah pusat, sehingga otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut mungkin akan sulit untuk dilaksanakan. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu adanya kajian mengenai kemampuan PAD Kabupaten/Kota guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Penelitian ini akan mengungkap beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauhmana kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
2. Variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dalam penerimaan PAD Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah,
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerimaan PAD.
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.1. Tinjauan Pustaka

Peranan Pemerintah dalam perekonomian sangat penting terutama pada negara berkembang karena pemerintah merupakan penggerak utama dalam proses pembangunan. Sedangkan proses pembangunan itu sendiri terkadang menciptakan perubahan yang dianggap identik dengan kemajuan.

Bersamaan dengan kemajuan tersebut terjadi proses peningkatan aspirasi dan pergeseran persepsi masyarakat, sehingga perencana dan pembuat kebijakan dituntut untuk memahami hal ini. Dengan kondisi demikian, tujuan pembangunan cenderung makin multidimensi. Sebagai contoh adalah masalah pemerataan pembangunan yang tidak terlalu dominan sebelum tahun 1970-an. Selama dasa warsa 1970-1980 masalah ini menjadi menonjol. Banyak rencana pembangunan yang mulai memasukkan tujuan pemerataan secara eksplisit, disamping pertumbuhan.

Persoalan yang dihadapi ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, dimana masalah ekonomi sosial di masyarakat terlalu kompleks untuk ditampung dalam sebuah model. Nilai berbagai variabel yang diprediksi oleh model, dalam kenyataannya harus disesuaikan dengan persepsi politisi dan pengambil keputusan. Hal ini wajar dan memang seharusnya demikian karena model adalah simplifikasi dunia nyata. Masih banyak aspek yang belum dan tak mungkin

tertangkap olehnya, sehingga penyesuaian terhadap hasil suatu model perencanaan merupakan hal yang sangat penting.

Berikut ini beberapa pengertian sebagai latar belakang teori yang mendasari penelitian ini.

2.1.1. Sumber Penerimaan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya (Kaho, 1997: 61; Suparmoko, 2002: 16). Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Sehubungan hal tersebut, daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 79 UU nomor 22 tahun 1999 jo. Pasal 3 UU nomor 25 tahun 1999, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana perimbangan;

3. Pinjaman daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Davey (1988), sumber pendapatan pemerintah regional adalah sebagai berikut :

1. Alokasi dari pemerintah pusat :
 - 1) Anggaran pusat (votes)
 - 2) Bantuan pusat (grants)
 - 3) Bagi-hasil pajak
 - 4) Pinjaman
 - 5) Penyertaan modal
2. Perpajakan
3. Retribusi (charging)
4. Pinjaman
5. Perusahaan (badan usaha).

Hal senada juga dikatakan oleh Nazara (1997), bahwa sumber-sumber penerimaan di dalam APBD terdiri dari lima komponen besar, yaitu : PAD; dana perimbangan; pinjaman daerah; dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. PAD terdiri dari : hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; bagian laba dari perusahaan atau BUMD; penerimaan dari dinas-dinas; dan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mencakup : penerimaan dari hasil penjualan barang bekas dan sisa; bunga simpanan di bank; dan sebagainya.

2.1.2. Indikator Desentralisasi Fiskal Daerah.

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (otonomi fiskal). Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Menurut Booth (2000 : 118), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah atasan. Lebih jauh Booth (2000 : 128) mengatakan:

Sejauhmana tinggi rendahnya ketergantungan pemerintah propinsi dan pemerintah lokal kepada bantuan-bantuan pemerintah pusat tersebut merupakan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Terdapat suatu kecenderungan dari sebagian peneliti yang mengemukakan bahwa ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat merupakan "hal yang buruk", dan kemandirian keuangan merupakan "hal yang baik" tanpa mempertimbangkan dari sudut pandang kepentingan kebijaksanaan pembangunan yang lebih panjang.

Pertanyaan sebenarnya adalah, sejauh mana tingginya ketergantungan tersebut mengakibatkan terganggunya mobilisasi sumber-sumber daya bagi investasi, pelaksanaan proyek-proyek, dan kemudian keberhasilan pembangunan jangka panjang di negara yang bersangkutan ?

Mengutip pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan itu merupakan masalah yang membutuhkan penanganan baik dari sisi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut Suparmoko (1987 : 320-325), untuk mengukur desentralisasi fiskal daerah dapat digunakan rasio antara pendapatan PAD dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah

bisa diwujudkan hanya apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Halim, 2001: 348; Radianto, 1997: 42).

Menurut Radianto, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masing sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PADnya. Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah, yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam tahun yang sama. Kuncoro (1995: 3; 1997: 408), menyebutkan bahwa realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Menurut Sugiyanto (2000: 2), ukuran yang digunakan adalah perbandingan PAD terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Rumusnya adalah R/E ($R = \text{PAD}$ dan $E = \text{anggaran pengeluaran}$). Apabila rasio tersebut semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar. Sedangkan menurut Sukanto (2000), untuk pengukuran derajat desentralisasi fiskal digunakan :

- Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah,
- Perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah, dan
- Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah.

Selanjutnya Tim LPEM-FEUI pada Laporan Akhir Kebijakan Desentralisasi dalam Masa Transisi (2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Perbandingan PAD dengan Total Pengeluaran
- Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Total Pengeluaran
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin
- Perbandingan PAD per kapita dengan Pengeluaran Rutin per kapita
- Perbandingan PAD per kapita dengan Total Pengeluaran per kapita
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita dengan Total Pengeluaran per kapita
- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita dengan Pengeluaran Rutin per kapita

Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.

2.1.3. PDRB perkapita.

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator pembangunan, selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan Negara Sedang Berkembang (NSB). Dengan kata lain selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di berbagai negara. Arsyad, (1999, 25-32), menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita bisa digunakan sebagai suatu titik awal untuk

pengklasifikasian tingkat-tingkat pembangunan, dan dapat digunakan untuk identifikasi kebutuhan pembangunan. Tetapi juga disebutkan bahwa salah satu kelemahan penting dari tingkat pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan (indeks kesejahteraan) adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Kelemahan itu timbul karena perbandingan antara kesejahteraan dengan jurang (gap) tersebut mengabaikan perbedaan pada struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat nasional, metoda penghitungan pendapatan, dan perbedaan nilai kurs.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu perekonomian (daerah) dalam waktu satu tahun. Dalam konsep penghitungan PDRB, terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan penerimaan dan pendekatan pengeluaran (Arsyad, 1999: 13). Sedangkan PDRB perkapita adalah jumlah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (Sukirno, 1994: 417).

PDRB perkapita setelah dikurangi pajak pribadi, disebut pendapatan disposibel (Sukirno, 1999: 44) yang merupakan pendapatan siap dikonsumsi rumah tangga. Semakin besar tarif pajak, pendapatan disposable akan menurun yang pada gilirannya akan menurunkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Tetapi, pajak tersebut akan menambah penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pemerintah yang juga meningkat. Peningkatan pembiayaan program pembangunan tersebut selanjutnya akan mendorong peningkatan produksi dan PDRB perkapita. Peningkatan PDRB perkapita tersebut

akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah lainnya. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Musgrave (1999 : 138) mengatakan bahwa “elastisitas pendapatan dari permintaan konsumen terhadap jasa-jasa publik bisa bersifat elastis, sehingga jasa-jasa publik mempunyai sifat sebagai barang mewah. Hal ini berarti terdapat suatu proporsi yang meningkat dari pengeluaran, selama pendapatan per kapita meningkat”. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluarannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.1.4. Pengeluaran Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.

Mekanisme penyusunan pengeluaran anggaran pembangunan selalu didasarkan atas kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah, untuk

menentukan alokasi kegiatan proyek, inisiatif harus dari masyarakat itu sendiri melalui pemerintahan tingkat bawah (Permendagri nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah/P5D). Perencanaan dilakukan secara bertingkat dan bertahap, yaitu mulai dari MUSBANG (tingkat Desa/Kelurahan), UDKP (Kecamatan), RAKORBANG (Kabupaten/Kota dan Propinsi), KONREGBANG dan RAKORNASBANG. Pada tiap tingkat pembahasan menghasilkan Daftar Urutan Rencana Proyek/Kegiatan (URP/K) yang akan dibiayai dari dana APBD (propinsi dan kabupaten/kota) maupun APBN. Khusus DURP/K hasil pelaksanaan RAKORBANG kabupaten/kota merupakan dasar untuk penyusunan APBD kabupaten/kota, dengan tetap memperhitungkan skala prioritas pembangunan menurut pola dasar, Rencana Strategis (RENSTRA), Repetada, RUTRK, dan PJM pembangunan daerah.

Menurut Musgrave (1993: 122), besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan banyak ditentukan oleh variabel jumlah penduduk dan perubahan harga. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pemerintah, dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Sukirno, 1994: 151). Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga akan meningkat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Richard Tumilaar (1997), dalam tesisnya menganalisis derajat otonomi fiskal di Propinsi Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat bantuan pemerintah pusat. Sementara tingkat ekonomi dan transfer menunjukkan pengaruh yang bervariasi pada masing-masing daerah. Tetapi yang terpenting, aspek ekonomi dan keuangan paling besar pengaruhnya untuk mengukur derajat otonomi fiskal. Penelitian memakai metode OLS dengan model koreksi kesalahan (*Engle Granger ECM*) dengan data runtut waktu tahun 1979-1993. Variabel yang digunakan adalah : derajat otonomi fiskal (Y); perkembangan ekonomi daerah (X_1); bantuan pemerintah pusat (X_2); dan transfer (X_3).
2. Elia Radianto (1997), dalam penelitiannya tentang Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II di Maluku, menyimpulkan bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi (PE) dan bantuan pemerintah pusat (G), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal daerah (Y). Menggunakan alat analisis linear dinamis yaitu *Partial Adjustment Model* (PAM) dengan data kurun waktu tahun 1986/1987-1994/1995.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Russek (1997) tentang struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara bagian Amerika Serikat menemukan pengaruh positif dan negatif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Positif bila untuk pembiayaan sektor publik, dan negatif bila untuk pembayaran transfer. Sedangkan analisis pertumbuhan ekonomi yang digunakan terhadap data runtun waktu (1978-1992) adalah model *Two*

Regression, dengan variabel-variabel pengeluaran dan penerimaan dalam skope negara maupun lokal (negara bagian).

4. Kerjasama LP2I Semarang dengan pemerintah Propinsi Jawa Tengah (2000) tentang penggalian sumber-sumber pendapatan baru di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa kondisi geografis, pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000, merupakan peluang utama dalam penelitian tersebut. Variabel lainnya adalah kondisi demografi, sosial budaya, serta kondisi pemerintahan.

Kontribusi terbesar pada PAD adalah retribusi yang diikuti pajak, sumber lain, dinas, dan BUMD. Penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT dari hasil diskusi kelompok dengan beberapa instansi terkait serta para pakar di bidang keuangan publik yang dilanjutkan dengan analisis diskriptif.

5. Abdul Halim (2001) dalam penelitiannya tentang *fiscal stress*, disebutkan bahwa PAD masih berperan terhadap total penerimaan daerah/propinsi. Retribusi sebagai komponen utama PAD, berpengaruh secara signifikan daripada pajak. Sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak berpengaruh terhadap PAD. Analisis berdasarkan data realisasi anggaran propinsi sebelum *fiscal stress* (1996/1997) dan sesudahnya (1998/1999). Selanjutnya dilakukan pengujian dengan *Paired Sample T Test*, yaitu membandingkan dua sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Penelitian tersebut hanya terfokus pada angka rata-rata seluruh propinsi di Indonesia.

6. Rita Engleni (2001) yang meneliti tentang PAD di Kota Padang menyimpulkan perlunya rencana penerimaan PAD jangka menengah yang memenuhi unsur rasionalitas dan berorientasi ke depan. Skenario ini merupakan langkah penting sebagai respon semangat kemandirian pendanaan daerah. Disamping sebagai pedoman penentuan langkah dan tindakan oleh dinas/unit kerja pengelola penerimaan PAD, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yang dikaitkan dengan beberapa indikator pokok yaitu rata-rata pertumbuhan komponen PAD sebagai dasar untuk memprediksi. Rumusnya :

7. Yuliati (2001) pada penelitiannya tentang kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang menyebutkan bahwa untuk mencapai kemandirian dengan mengandalkan PAD + bagi hasil, efeknya relatif lebih cepat daripada hanya mengandalkan PAD saja. Sementara penghitungan rasio PAD terhadap PDRB dengan menggunakan harga berlaku, menunjukkan hasil yang kurang baik.

Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (1995/1996-1999/2000), dengan pengelompokan beberapa alat analisis, yaitu :

- Derajat desentralisasi fiskal, yaitu : rasio PAD dengan total pendapatan ; rasio PAD + bagi hasil dengan total pendapatan; rasio PAD dengan pengeluaran rutin; dan rasio PAD + bagi hasil dengan pengeluaran rutin.
- Kebutuhan fiskal, dihitung dari total antara pengeluaran daerah dibagi jumlah penduduk, kemudian dibagi dengan jumlah kabupaten/kota.

- Kapasitas fiskal diperoleh dari jumlah antara PDRB dibagi jumlah penduduk, lalu dibagi dengan jumlah kabupaten/kota.
- Upaya fiskal, dihitung dengan mencari koefisien elastisitas pertumbuhan rata-rata PAD terhadap PDRB (harga konstan dan berlaku).

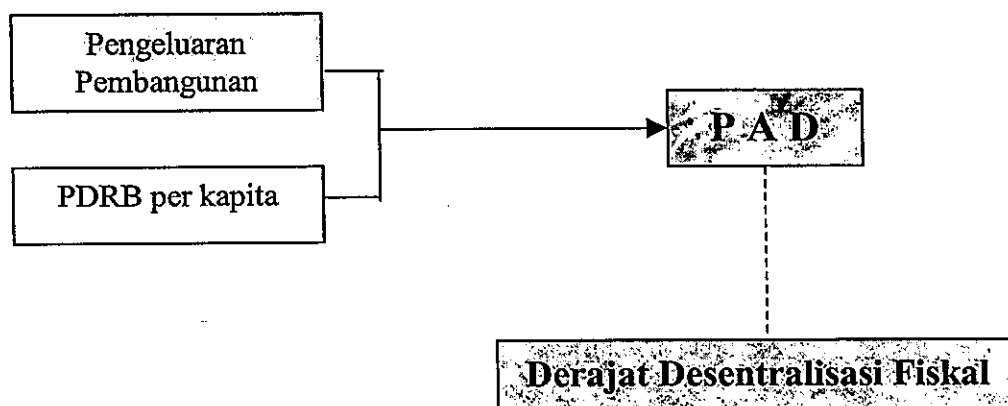
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini akan diawali dengan analisis deskriptif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal, yang tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah terhadap pemerintah pusat.

Berikutnya adalah menganalisa pengaruh Pengeluaran Pembangunan, Tenaga Kerja, PDRB perkapita dan inflasi terhadap PAD. Penghitungan dengan menggunakan analisis regresi, yang secara garis besar dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran penelitian sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada Derajat Desentralisasi Fiskal. Perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu antara lain terletak pada : variabel-variabel; jenis dan periode data; lokasi penelitian, dan alat analisis yang digunakan.

2.4. Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian teoritis, dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah masih rendah.
2. Diduga bahwa Pengeluaran Pembangunan dan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap PAD.

2.5. Definisi operasional

Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pemerintahannya. Ukuran yang dipakai adalah rasio : PAD terhadap total penerimaan daerah ; Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah ; dan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (dalam satuan persen).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan yang bersumber dari : pajak daerah; retribusi daerah; hasil

perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain penerimaan yang sah (dalam satuan rupiah).

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB perkapita) pada 35 Kabupaten/Kota berdasarkan harga konstan tahun dasar 1993 (dalam satuan rupiah).
4. Pengeluaran pembangunan merupakan jumlah pengeluaran pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk 21 sektor pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mencakup 35 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. dengan menggunakan 2 (dua) jenis data sekunder yaitu data kerat lintang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*). Secara umum data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dan Lembaga/Instansi yang terkait dengan penelitian ini. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah maupun buku teks.

Sesuai dengan topik penelitian, maka data yang diperlukan adalah :

1. Penerimaan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000- 2001 yang meliputi : Sisa Anggaran Tahun Lalu, PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan Daerah (SDO, Bantuan Lain, DAU, DAK), dan Pinjaman Daerah.
2. PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000 – 2001.
3. Pengeluaran pemerintah sektor Rutin dan Pembangunan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000 – 2001.

3.2. Teknik analisis.

3.2.1. Deskriptif Statistik

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal, digunakan indikator/rasio dengan mengacu pada penelitian Yuliati (2000).

Rumusannya sebagai berikut :

- a. Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
- b. Rasio PAD + Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah
- c. Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran Rutin
- d. Rasio PAD + Bagi Hasil terhadap Total Pengeluaran Rutin

Dimana : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

Bagi Hasil = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Apabila rasio tersebut semakin tinggi (dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah), berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin tinggi.

Dari hasil perhitungan tersebut, khususnya rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah, diterapkan dalam kriteria DDF seperti yang digunakan oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991). Sedangkan kriterianya adalah sebagai berikut :

- 1) 0,00 % s/d 10 % : sangat kurang
- 2) 10,1 % s/d 20 % : kurang
- 3) 20,1 % s/d 30 % : cukup
- 4) 30,1 % s/d 40 % : baik
- 5) 40,1 % s/d 50 % : sangat baik
- 6) > 50 % : memuaskan

3.2.2. Analisis Regresi.

Untuk tujuan kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah, digunakan analisis regresi berganda

dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) atau metode kuadrat terkecil biasa. Sedangkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengeluaran Pembangunan (PP) dan PDRB per kapita (PKT). Model regresi berganda (Gujarati, 1999 : 198) dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i, \dots\dots\dots (1)$$

Dimana Y adalah variabel bebas, X_2 dan X_3 variabel-variabel yang menjelaskan, u faktor gangguan (disturbance) yang stokhastik, dan i menyatakan observasi (pengamatan) yang ke i . Dalam penelitian ini digunakan bentuk log dengan persamaan model regresi adalah sebagai berikut :

$$\text{LnPAD} = \beta_1 + \beta_2 \text{LnPP} + \beta_3 \text{LnPKT} + \mu \dots\dots\dots (2)$$

dimana : PAD = Pendapatan Asli Daerah
 PP = Pengeluaran Pembangunan
 PKT = PDRB perkapita
 β_1 = konstanta
 β_2, β_3 = parameter
 μ = disturbance

Untuk menghasilkan model yang sah secara teoritis, maka harus memenuhi asumsi klasik. Hal ini bertujuan agar diperoleh nilai prediksi yang konsisten dan efisien sesuai dengan teori. Adapun asumsi klasik tersebut meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (Gujarati, 1999).

1. Uji multikolinearitas, untuk menguji apakah pada model regresi terdapat hubungan linear baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variabel yang menjelaskan. Ada tidaknya multikolinearitas ini ditunjukkan dari nilai R^2 yang tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel bebas berdasar uji t-statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada yang signifikan (Gujarati, 1999 : 322).

Karena dalam penelitian ini hanya digunakan 2 (dua) variabel penjelas, maka pengujian multikolinearitas dilakukan melalui pemeriksaan korelasi derajat nol atau sederhana antara dua variabel tersebut. Jika korelasinya tinggi, maka dalam model terdapat multikolinearitas (Gujarati, 1999 : 323). Model regresi yang baik adalah yang tidak ada korelasi diantara variabel bebasnya .

2. Uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat heteroskedastisitas maka penaksir ini tidak lagi mempunyai varians minimum atau efisien sehingga nilainya diragukan (Gujarati: 1999). Kebanyakan data kerat lintang (*cross-section*) mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini mewakili berbagai ukuran. Dengan uji white, suatu model dikatakan lolos adanya heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (Gujarati, 1999 : 356-358).
3. Uji autokorelasi, untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*), karena gangguan pada individu/kelompok cenderung mempengaruhi individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Penerapan OLS dalam situasi autokorelasi akan memberikan kesimpulan yang menyesatkan arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir (Gujarati, 1999: 382; Sumarno : 207). Dengan uji Durbin-Watson, akan diketahui apakah data yang diamati mengandung situasi autokorelasi (Gujarati 1999 : 386-391).

Berikutnya juga dilakukan uji statistik, karena ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*, dengan mengukur nilai R^2 (Koefisien Determinasi), nilai t, dan nilai F (Ghozali, 2001: 40-42).

Koefisien Determinasi (R^2), intinya untuk mengukur berapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang nilainya di antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Uji F (signifikansi simultan), untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara simultan. F statistik yang simultan lebih besar dari F-tabel pada derajat yang ditentukan. Sedangkan Uji t (signifikansi parameter individual), untuk melihat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara individu. Nilai t yang signifikan lebih besar dari t-tabel pada derajat yang ditentukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Propinsi Jawa Tengah umumnya dan Kabupaten/Kota pada khususnya, PAD merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji. Landasan pemikirannya adalah bahwa PAD merupakan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut ini secara berturut-turut akan dibahas potensi Sumber Daya Alam, kondisi ekonomi, ketenagakerjaan dan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

4.1. Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Secara geografis, Propinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40" sampai 8°30" lintang selatan dan antara 108°30' sampai 111°30' bujur timur. Sebelah utara dibatasi Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Lautan Indonesia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat serta sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Secara tofografis, Jawa Tengah memiliki relief yang sangat beragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa 53,3 % dari seluruh wilayah Jawa Tengah berupa dataran rendah.

Luas wilayah daratan Jawa Tengah adalah 35.026 Km² yang meliputi 6 wilayah Kota dan 29 Kabupaten. Daerah yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Blora (2.623,48 Km²) sedangkan yang tersempit adalah Kota

Tegal (12,67 Km²). Penggunaan tanah selama selama dua tahun terakhir (2000-2001) terdapat kecenderungan perubahan dalam pola penggunaan tanah. Pada tahun 2000, dengan luas lahan padi (sawah dan ladang) sekitar 1,669 juta Ha, produktivitas rata-rata padi mencapai 50,77 kuintal per hektar. Sementara pada tahun 2001 luas lahan menurun 18.861 Ha (1,13%), dengan produktivitas rata-rata hanya 50,33 kuintal per hektar (turun 1,08%). Turunnya luas lahan yang diiringi produktivitas tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi. Apabila hal ini terus dibiarkan oleh pemerintah, nampaknya sulit bagi Propinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan predikatnya sebagai daerah penyangga pangan nasional.

Potensi sumber daya alam di Jawa Tengah dilihat dari aspek sumber daya bahan galian menunjukkan potensi yang positif. Dari berbagai jenis tanah yang ada, Jawa Tengah kaya sekali dengan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Hal ini tentunya akan merupakan modal yang besar bagi daerah dan propinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan otonom. Tetapi sumber bahan tambang yang cukup melimpah tersebut belum seluruhnya dapat digali. Bahan-bahan galian tersebut seperti misalnya bahan galian golongan A, B dan C yang dieksplorasi dan eksplotasi dengan produksi mencapai 13,41 juta meter kubik (tahun 2001).

4.2. Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diamati dari pertumbuhan PDRB sebagaimana tabel 4.1. Rata-rata tingkat pertumbuhan selama tahun 1999 s/d 2001 adalah sebesar 3,48%. Angka ini terpaut sedikit dengan prediksi pemerintah yaitu sebesar 3,16% (REPETADA

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001). Dalam tahun 2001, daerah dengan pertumbuhan PDRB terendah adalah Kabupaten Banjarnegara (0,15%) dan tertinggi di Kota Tegal (5,22%). Sedangkan kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan di atas rata-rata Jawa Tengah adalah : Cilacap, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Rembang, Jepara, Semarang, Temanggung, Tegal, dan Brebes. Sedangkan untuk daerah kota, yaitu Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang dan Pekalongan dan Tegal nilainya 3,48% ke atas.

Tabel 4.1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1999 – 2001 (dalam ribuan rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun 1999	Tahun 2000		Tahun 2001		Rata-rata Pertumbuh
		Nilai	Nilai	Pertmbhn (%)	Nilai	Pertmbhn (%)	
	KABUPATEN						
1	Cilacap	6.099.644,82	6.521.560,42	6,92	6.846.182,16	4,98	5,95
2	Banyumas	988.804,68	1.028.604,67	4,03	1.040.236,79	1,13	2,58
3	Purbalingga	595.126,84	611.664,77	2,78	629.866,08	2,98	2,88
4	Banjarnegara	841.678,42	851.218,96	1,13	852.466,99	0,15	0,64
5	Kebumen	859.265,17	899.383,01	4,67	915.370,26	1,78	3,22
6	Purworejo	668.176,79	684.306,71	2,41	707.550,88	3,40	2,91
7	Wonosobo	502.526,04	522.318,24	3,94	527.635,31	1,02	2,48
8	Magelang	1.019.215,60	1.054.929,26	3,50	1.096.210,91	3,91	3,71
9	Boyolali	884.481,69	902.682,45	2,06	935.467,99	3,63	2,84
10	Klaten	1.153.627,74	1.199.511,88	3,98	1.247.746,75	4,02	4,00
11	Sukoharjo	1.074.922,61	1.112.790,80	3,52	1.157.846,99	4,05	3,79
12	Wonogiri	756.802,53	783.586,68	3,54	804.087,16	2,62	3,08
13	Karanganyar	1.141.544,82	1.193.085,08	4,51	1.210.084,81	1,42	2,97
14	Sragen	677.594,02	696.930,13	2,85	712.656,17	2,26	2,56
15	Grobogan	674.329,35	711.751,54	5,55	741.821,42	4,22	4,89
16	Blora	688.893,26	702.214,14	1,93	723.134,79	2,98	2,46
17	Rembang	480.222,34	504.132,77	4,98	524.181,35	3,98	4,48
18	Pati	937.480,81	940.874,70	0,36	969.013,34	2,99	1,68
19	Kudus	3.030.322,68	3.087.617,87	1,89	3.185.798,25	3,18	2,54
20	Jepara	945.638,80	989.279,74	4,61	1.037.969,05	4,92	4,77
21	Demak	723.427,58	744.316,44	2,89	769.047,86	3,32	3,11
22	Semarang	999.629,79	1.047.365,80	4,78	1.082.378,77	3,34	4,06
23	Temanggung	674.562,25	697.991,69	3,47	728.586,02	4,38	3,93
24	Kendal	1.517.220,96	1.550.532,38	2,20	1.594.832,69	2,86	2,53
25	Batang	707.438,02	721.649,41	2,01	737.198,22	2,15	2,08
26	Pekalongan	842.326,12	862.264,91	2,37	899.546,40	4,32	3,35
27	Pemalang	1.050.130,47	1.089.043,63	3,71	1.124.314,36	3,24	3,47
28	Tegal	869.114,69	911.693,10	4,90	952.070,98	4,43	4,66
29	Brebes	1.320.755,76	1.381.023,44	4,56	1.447.843,91	4,84	4,70

30 .Magelang

Lanjutan ...

30	KOTA Magelang	306.308,29	318.423,23	3,96	328.162,25	3,06	3,51
31	Surakarta	1.250.807,41	1.302.715,92	4,15	1.353.882,64	3,93	4,04
32	Salatiga	245.601,15	254.362,19	3,57	263.644,76	3,65	3,61
33	Semarang	4.899.241,89	5.142.532,90	4,97	5.405.239,41	5,11	5,04
34	Pekalongan	417.953,57	434.639,68	3,99	453.338,37	4,30	4,15
35	Tegal	341.508,56	358.969,48	5,11	377.701,80	5,22	5,17
	Rata-rata			3,59		3,36	3,48

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2002, diolah.

Kondisi perekonomian Nasional, ternyata mampu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Selama tahun 1999/2000 sampai dengan 2001, pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yaitu dari 3,59% menjadi 3,36%. Penurunan tersebut terjadi karena selama 3 tahun tersebut, beberapa sektor mengalami rata-rata pertumbuhan yang minus sebagaimana tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.
Distribusi Persentase dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999 – 2001

No	Sektor	1999	2000	Pertum- buan	2001	Pertum- buan	Rata-rata Pertumbuhan
1	Pertanian	43,41	42,34	-2,87	44,69	9,69	3,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,55	-15,68	0,52	-1,75	-8,71
3	Industri Pengolahan	14,50	15,71	7,86	16,25	7,49	7,68
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,17	0,17	0,40	0,09	-45,97	-22,79
5	Bangunan	4,58	3,99	-13,21	4,57	18,88	2,83
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,06	20,91	3,84	18,77	-6,74	-1,45
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,16	4,45	6,34	3,93	-8,12	-0,89
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,54	0,89	63,17	0,80	-6,32	28,43
9	Jasa-jasa	11,92	10,98	-8,27	10,38	-1,74	-5,00

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2002, diolah.

Dalam tahun 2001, sektor yang sumbangannya terhadap PDRB mengalami peningkatan adalah sektor pertanian, dan sektor bangunan. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB, diikuti

sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan dan sektor jasa. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Dilihat dari sisi potensi relatif secara sektoral pada masing-masing daerah, maka sektor pertanian masih memegang peranan penting. Hal ini dapat diketahui nilai *Location Quotientnya* (LQ)², yaitu alat analisis untuk mengidentifikasi kemampuan suatu daerah dalam suatu ekspor lapangan usaha tertentu (hasil analisis periksa lampiran 47). Dengan nilai rata-rata koefisien sebesar 1,28, artinya sektor pertanian tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Dilihat dari perbandingan nilai rata-rata koefisien Jawa Tengah terhadap kabupaten/kota, terlihat bahwa angka per sektor pada masing-masing daerah sangat berbeda sesuai dengan potensinya. Sedangkan sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Sektor Jasa-jasa dan Sektor Bangunan (masing-masing sebesar 1,26); Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (1,23); Sektor Pertambangan dan Galian (1,19); Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (1,16); dan sektor Listrik, Gas dan Air Minum (1,13).

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perkembangan pendapatan per kapitanya. Karena semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Pendapatan perkapita ini menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa serta kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk.

² Location Quotient (LQ) = (PDRB sektor i di daerah / PDRB seluruh sektor di daerah) dibagi (PDRB sektor i di Jawa Tengah / PDRB seluruh sektor di Jawa Tengah) (Lincoln Arsyad, 1999 : 315-317).

Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 1993 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (1999-2001) dengan rata-rata 2,81% sebagaimana tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3.
Produk Domestik Regional Bruto per kapita Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999 – 2001

No	Kab/Kota	1999	2000		2001		Rata-rata Pertumbuhn (%)
		Nilai	Nilai	Prtbhn (%)	Nilai	Prtbhn (%)	
	KABUPATEN						
1	Cilacap	3.709.197,11	4.054.560,93	9,31	4.193.900,60	3,44	6,37
2	Banyumas	675.405,19	659.805,69	-2,31	697.250,77	5,68	1,68
3	Purbalingga	721.823,46	780.000,60	8,06	798.638,32	2,39	5,22
4	Banjarnegara	989.777,53	992.760,84	0,30	983.425,88	-0,94	-0,32
5	Kebumen	729.912,25	772.042,35	5,77	781.480,06	1,22	3,50
6	Purworejo	880.869,87	897.887,12	1,93	923.953,79	2,90	2,42
7	Wonosobo	713.077,47	700.988,22	-1,70	711.699,24	1,53	-0,08
8	Magelang	937.959,24	958.795,62	2,22	988.988,62	3,15	2,69
9	Boyolali	966.914,01	980.791,72	1,44	1.011.077,36	3,09	2,26
10	Klaten	933.040,23	1.080.591,70	15,81	1.121.539,87	3,79	9,80
11	Sukoharjo	1.391.845,42	1.425.582,03	2,42	1.465.467,71	2,80	2,61
12	Wonogiri	685.385,92	707.420,17	3,21	721.600,31	2,00	2,61
13	Karanganyar	1.465.497,42	1.514.920,95	3,37	1.505.022,58	-0,65	1,36
14	Sragen	805.881,49	824.873,84	2,36	840.211,14	1,86	2,11
15	Grobogan	518.963,07	539.665,25	3,99	557.181,08	3,25	3,62
16	Blora	839.876,11	851.487,58	1,38	874.153,56	2,66	2,02
17	Rembang	866.215,97	905.422,24	4,53	931.356,40	2,86	3,70
18	Pati	810.850,00	806.927,90	-0,48	823.516,15	2,06	0,79
19	Kudus	4.480.339,88	4.387.559,66	-2,07	4.481.264,64	2,14	0,03
20	Jepara	1.080.098,78	1.020.967,51	-5,47	1.054.018,59	3,24	-1,12
21	Demak	778.505,27	766.614,18	-1,53	776.345,51	1,27	-0,13
22	Semarang	1.270.863,92	1.257.018,97	-1,09	1.294.194,39	2,96	0,92
23	Temanggung	1.032.253,61	1.063.526,97	3,03	1.099.506,86	3,38	3,21
24	Kendal	1.758.877,91	1.824.737,51	3,74	1.810.210,40	-0,80	1,47
25	Batang	1.101.737,89	1.092.109,25	-0,87	1.107.765,83	1,43	0,28
26	Pekalongan	1.091.955,91	1.093.198,78	0,11	1.115.600,24	2,05	1,08
27	Pemalang	837.996,65	863.317,25	3,02	885.474,45	2,57	2,79
28	Tegal	652.072,39	661.039,97	1,38	684.833,28	3,60	2,49
29	Brebes	835.947,82	841.558,41	0,67	847.699,17	0,73	0,70
	KOTA						
30	Magelang	2.655.602,85	2.762.388,02	4,02	2.832.329,99	2,53	3,28
31	Surakarta	2.296.403,60	2.657.443,32	15,72	1.758.100,62	3,79	9,75
32	Salatiga	1.697.066,42	1.756.790,55	3,52	1.816.974,11	3,43	3,47
33	Semarang	3.824.156,71	3.959.928,10	3,55	4.088.522,54	3,25	3,40
34	Pekalongan	1.701.973,25	1.663.323,30	-2,27	1.728.649,65	3,93	0,83
35	Tegal	1.457.302,16	1.515.278,50	3,98	1.568.776,65	5,53	3,75
	Rata-rata	1.348.447,05	1.389.752,14	3,06	1.425.163,72	2,55	2,81

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2002, diolah.

Pada tahun 1999 rata-rata PDRB per kapita di Jawa Tengah mencapai 1,35 juta rupiah. Pada tahun 2000 jumlah ini meningkat menjadi 1,38 juta rupiah, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3,06%. Dan pada tahun 2001, tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 2,55% dengan PDRB per kapita sebesar 1,425 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 1999, maka pada tahun 2001 angka nominalnya mengalami kenaikan sekitar 2,685 juta rupiah (5,38%), sedangkan terhadap tahun 2000 naik sekitar 1,239 juta rupiah (2,48%). Namun kenaikan PDRB per kapita tersebut sebenarnya mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,51% terhadap tahun 2000.

Demikian pula dengan PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota, dalam kurun waktu tahun 1999/2000-2001 sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi diikuti Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang. Dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata, yang tertinggi adalah Kabupaten Klaten (9,80%), dan yang terendah yaitu sebesar -1,12% adalah Kabupaten Jepara.

4.3. Keuangan Daerah

Salah satu masalah yang sering muncul dalam keuangan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Meskipun telah diambil berbagai upaya selama bertahun-tahun untuk menyerahkan wewenang memungut pajak kepada pemerintah daerah, namun sumber daya pemerintah daerah tetap saja pada tingkat yang rendah.

Analisis terhadap keuangan daerah dimaksudkan untuk melihat kondisi di suatu daerah terhadap kinerja keuangan baik menyangkut sisi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber utama daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan akan semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal tersebut diperlukan karena UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang berlaku mulai awal tahun 2001, mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus dapat membiayai semua kegiatannya dengan PAD yang ada. PAD dapat digali dari misalnya pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemberlakuan otonomi itu sendiri telah menimbulkan dampak dengan semakin membengkaknya pembiayaan daerah. Pemerintah daerah harus mengeluarkan tambahan tunjangan jabatan dan gaji untuk pegawai-pegawai limpahan dari instansi vertikal. Hal inilah yang semakin membebani pemerintah kabupaten/kota, terutama yang PADnya kecil. Berikut ini adalah rekapitulasi penerimaan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.4.
Rekapitulasi Penerimaan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1999/2000 – 2001

Keterangan	1999/2000	2000	2001
PAD	376.223.179.000 (10,88%)	359.547.823.000 (10,66%)	676.549.049.000 (7,29%)
Bagi Hasil	251.714.797.000 (7,28%)	298.443.283.000 (8,85%)	485.495.440.797 (5,23%)
Sumbangan Daerah	2.681.235.725.000 (77,52%)	2.575.019.312.000 (76,32%)	7.821.904.071.329 (84,26%)
Total Penerimaan	3.458.607.024.000	3.373.962.728.000	9.283.603.766.645

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1999/2000-2001, diolah.

Tabel 4.4. tersebut menunjukkan bahwa seluruh pos penerimaan kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam jumlah rupiah. Peningkatan terbesar ada pada pos sumbangan daerah, dengan prosentase yang meningkat pula. Secara sekilas sudah dapat diduga adanya ketergantungan pendanaan pemerintah daerah pada pusat. Pada tahun 2000 jumlah totalnya mengalami penurunan, karena pada tahun tersebut tidak tercatat adanya pinjaman daerah seperti tahun sebelumnya.

Penerimaan yang berasal dari berbagai sumber tersebut, setelah melalui beberapa tahap pembahasan baik di tingkat yang terbawah, kemudian dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Secara garis, besar alokasi dana tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan. Selain pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga ikut berperan dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Keberadaan mereka sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah. Tabel 4.5. berikut ini adalah prosentase anggaran belanja rutin dan pembangunan terhadap penerimaan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000-2001.

Tabel 4.5.
 Prosentase Anggaran Rutin dan Pembangunan terhadap Penerimaan
 Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999/2000-2001

No	Kabupaten/Kota	1999/2000		2000		2001	
		Rutin	Pemb	Rutin	Pemb	Rutin	Pemb
1	cilacap	64.85	27.78	69.03	25.73	46.25	8.45
2	Banyumas	77.22	18.43	76.49	18.74	57.03	7.79
3	Purbalingga	74.91	21.83	73.43	19.84	61.30	28.10
4	Banjarnegara	80.49	19.51	81.84	18.16	77.16	7.71
5	Kebumen	75.99	20.08	74.76	15.88	43.28	6.38
6	Purworejo	83.38	18.14	76.97	18.79	68.32	28.55
7	wonosobo	62.12	17.76	72.37	19.65	76.08	10.86
8	magelang	82.09	14.08	74.42	13.94	73.16	8.67
9	boyolali	78.20	18.97	75.23	19.97	78.67	8.30
10	klaten	82.23	15.18	82.09	13.69	75.54	10.05
11	sukoharjo	75.31	20.12	73.31	21.56	69.03	13.75
12	wonogiri	77.11	19.10	74.85	17.52	78.50	9.93
13	karanganyar	75.16	19.62	76.99	17.84	72.30	17.15
14	sragen	82.49	14.71	77.97	16.21	70.47	17.50
15	grobogan	77.71	19.19	74.74	15.25	81.21	6.64
16	blora	74.62	21.52	75.58	19.61	63.89	30.74
17	rembang	73.10	23.48	72.63	20.91	69.66	20.73
18	pati	75.64	21.19	75.75	17.08	70.70	16.77
19	kudus	80.03	18.60	74.78	18.66	65.67	14.70
20	jepara	73.95	23.81	73.70	24.04	82.28	10.57
21	demak	73.72	21.35	76.98	15.23	80.65	4.36
22	semarang	72.22	22.42	70.45	19.36	68.20	17.03
23	temanggung	79.62	15.18	72.61	20.78	58.38	25.11
24	kendal	71.12	23.87	72.17	21.34	51.91	40.71
25	batang	71.88	25.66	74.58	19.96	74.74	19.35
26	pekalongan	79.42	15.32	76.49	16.91	79.28	15.99
27	pemalang	75.48	22.57	76.90	20.51	67.50	16.28
28	tegal	70.13	26.81	60.58	33.46	65.48	21.27
29	brebes	81.22	18.24	76.88	20.69	49.84	6.62
30	k magelang	70.56	24.43	69.21	21.92	22.88	7.49
31	k surakarta	114.19	91.04	56.79	33.96	68.06	28.09
32	k salatiga	70.48	16.79	60.05	20.78	70.48	12.43
33	k semarang	76.75	20.22	63.24	28.25	53.04	40.17
34	k pekalongan	66.83	27.18	57.27	38.14	69.72	16.06
35	k tegal	70.32	25.90	70.36	24.78	78.04	8.25
		76.19	21.63	72.71	20.89	65.44	15.82

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 2001, diolah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pengeluaran rutin mencapai 65,44% sedangkan pengeluaran pembangunan hanya 15,82% (selengkapnya lihat lampiran 2). Memang antara jumlah anggaran pembangunan dan rutin tersebut sangat tidak seimbang, tetapi perbedaan tersebut harus dilihat dari tujuan masing-masing anggaran. Prioritas anggaran rutin ditujukan pada upaya peningkatan

kualitas pelayanan pada masyarakat dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan anggaran pembangunan diarahkan untuk program proyek prasarana sosial dan program pemulihan kegiatan perekonomian nasional.

Prosentase pengeluaran untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selama tiga tahun anggaran (1999/2000 – 2001), cenderung menurun meskipun nilai nominalnya mengalami kenaikan. Proporsi anggaran rutin terhadap penerimaan daerah tahun 1999/2000 76,19%, turun menjadi 65,44% pada tahun 2001. Sedangkan disisi anggaran pembangunan juga mengalami penurunan dari 21,63% pada tahun 1999/2000 menjadi 15,82% pada tahun 2001. Pertumbuhan rata-rata selama tiga tahun untuk anggaran rutin sebesar 70,38% dan anggaran pembangunan 51,51% (lihat lampiran 2).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pengamatan dengan berbagai metodologi yang menyertai. Hasil analisis ini sangat berkaitan dengan informasi yang diperlukan dan merupakan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya.

5.1. Analisis Deskriptif (Derajat Desentralisasi Fiskal)

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih menunjukkan besarnya peranan pemerintah dan signifikannya peran pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Sehingga diyakini bahwa perekonomian akan mudah sekali bergejolak yang berakibat pada melemahnya kegiatan ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam jangka panjang perlu diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan. Sebagai indikator dalam menganalisis pembiayaan ini adalah kemampuan fiskal daerah atau lebih populer disebut Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).

Dalam struktur keuangan daerah, PAD dipandang sebagai kemampuan riil keuangan daerah. Sebagaimana telah dikemukakan, PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Faktor kemampuan daerah diukur dari tiga indikator, yaitu besarnya PAD, Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak (BHP+BP), dan Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Secara ringkas, gambaran kemampuan keuangan seluruh

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1999/2000-2001 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999/2000-2001

Tahun	DDF a	DDF b	DDF c	DDF d
1999/2000	10,88	18,16	14,28	23,83
Tertinggi	28,17 (Kota Smg)	41,48 (Kota Smg)	36,70 (Kota Smg)	54,50 (Kota Smg)
Terendah	5,31 (Kab. Wnsobo)	8,95 (Kab. Wnsb)	6,82 (Kab. Klaten)	12,31 (Kab. Bnggra)
2000	10,66	19,50	14,66	26,82
Tertinggi	21,86 (Kota Smg)	37,19 (Kota Smg)	34,57 (Kota Smg)	58,81 (Kota Smg)
Terendah	5,21 (Kab. Klaten)	11,01 (Kab. Klaten)	6,35 (Kab. Klaten)	13,41 (Kab. Klaten)
2001	7,29	12,52	11,14	19,13
Tertinggi	41,89 (Kota Smg)	44,91 (Kota Smg)	78,98 (Kota Smg)	84,68 (Kota Smg)
Terendah	3,31 (Kota Mgl)	7,02 (Kab. Klaten)	5,29 (Kab. Klaten)	9,29 (Kab. Klaten)

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1999/2000-2001, diolah.

Keterangan : DDF a = PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)

DDF b = PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap TPD

DDF c = PAD terhadap Pengeluaran Rutin

DDF d = PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Pengeluaran Rutin

Dalam tabel diatas terlihat bahwa untuk tahun anggaran 2001 proporsi penerimaan PAD terhadap TPD seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah adalah sebesar 7,29% tetapi jika dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun nampak bahwa proporsi PAD ini semakin menurun. Demikian pula jika digabungkan antara PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak hanya memberikan proporsi 12,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Hasil selengkapnya dalam lampiran 3-5.

Namun jika dikaji lebih mendalam, ketergantungan yang semakin besar ini disebabkan beberapa hal, antara lain adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, perubahan dalam struktur anggaran (kenaikan gaji PNS). Sementara jika diamati perkembangan PAD dan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,

sebenarnya secara nominal terus meningkat. Tetapi peningkatan ini tidak sebanding jika dikaitkan dengan peningkatan untuk sisi pengeluarannya. Sehingga untuk mencapai keseimbangan antara sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tersebut diperlukan adanya subsidi dari pemerintah pusat. Hal inilah penyebab adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin membesar. Dikaitkan dengan kriteria DDF seperti yang digunakan oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM, maka kondisinya hanya pada batas kriteria "kurang" yaitu antara 10,1 % s/d 20 %. Sedangkan lainnya termasuk dalam katagori "sangat kurang". Dengan kata lain bahwa DDF kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah berada dibawah 20% (kurang) dengan rata-rata hanya sebesar 7,29%, atau 9,61% selama tiga tahun (1999-2001).

Disisi lain, perbandingan antara PAD sendiri ataupun antara PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Pengeluaran Rutin, masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dengan angka rasio masing-masing sebesar 11,14% dan 19,13% (tahun 2001), hal ini mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan rutinpun masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat (data anggaran rutin lihat lampiran 2).

Dengan membandingkan rata-rata DDF selama tiga (3) tahun tersebut, maka tahun 2001 merupakan kondisi yang kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan yang semakin besar. Artinya tingkat kemandirian seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih

rendah, bahkan cenderung turun. Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangannya, terutama untuk membelanjakan semua alokasi-alokasi anggaran yang ada. Salah satu penyebabnya adalah adanya perencanaan yang kurang matang dalam penyusunan anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu adanya sisa anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan sebagaimana tabel 5.2.berikut.

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Anggaran Sisa Lebih Tahun Sebelumnya
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1999/2000-2001

Tahun 1999/2000	Tahun 2000	Tahun 2001
Rp. 137.890.718.000	Rp. 140.932.309.000	Rp. 221.023.927.320

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1999/2000-2001, diolah.

Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mengelola keuangannya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Rendahnya rasio DDF tersebut erat kaitannya dengan tingkat mobilitas daerah yang dilihat dari rasio antara pajak dan retribusi terhadap PAD. Menurut kuncoro (1995: 11), tingkat mobilitas ini ditunjukkan dari rasio antara pajak dan retribusi terhadap PAD. Jika nilainya makin besar, maka makin tinggi kemampuan daerah dalam menyerap dana dari masyarakat dan semakin besar pula peluang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak. Tabel 5.3. berikut adalah rekapitulasi penghitungan rasio untuk pajak dan retribusi tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 (selengkapnya lihat pada lampiran 6-8).

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, rata-rata rasio pajak terhadap PAD tahun 1999, 2000 dan 2001 cenderung menurun. Dari 35,64% pada tahun 1999, menurun sebesar 2,1% pada tahun 2000 dan tahun 2001 menurun lagi sebesar 3,93%. Sedangkan untuk retribusi tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 3,3%, kemudian turun lagi sebesar 5,38%.

Tabel 5.3.
Rekapitulasi Penghitungan Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap PAD
Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 (dalam persen)

No	Daerah	Pajak			Retribusi		
		1999	2000	2001	1999	2000	2001
	KABUPATEN						
1	Cilacap	69,28	64,44	59,02	25,48	29,35	31,87
2	Banyumas	25,86	22,27	22,20	62,20	66,39	57,84
3	Purbalingga	20,16	17,69	14,72	61,56	68,52	55,49
4	Banjarnegara	21,12	23,14	14,92	73,99	70,65	63,46
5	Kebumen	22,56	25,16	17,78	48,01	50,31	40,57
6	Purworejo	17,84	14,17	14,62	74,93	78,35	66,21
7	Wonosobo	25,63	18,10	21,61	63,80	61,35	66,69
8	Magelang	50,29	57,80	46,49	37,18	31,00	33,62
9	Boyolali	19,16	15,31	16,91	76,30	73,36	70,46
10	Klaten	40,39	32,35	34,79	41,69	45,19	39,18
11	Sukoharjo	49,34	46,64	43,91	43,51	46,33	47,70
12	Wonogiri	13,43	13,75	4,49	68,52	74,66	72,45
13	Karanganyar	40,29	42,86	33,23	49,16	47,23	48,02
14	Sragen	19,98	19,48	19,65	68,63	69,00	64,45
15	Grobogan	18,60	17,43	12,45	69,62	75,15	75,51
16	Blora	17,00	12,88	11,39	73,67	67,95	58,60
17	Rembang	20,09	18,62	23,66	70,53	65,23	64,97
18	Pati	20,19	12,53	12,42	71,63	76,24	69,32
19	Kudus	24,66	25,70	21,90	71,58	73,33	71,09
20	Jepara	21,40	24,45	20,21	62,31	70,71	57,77
21	Demak	27,18	29,51	23,04	47,93	51,94	54,07
22	Semarang	34,25	37,34	35,11	58,20	53,38	49,78
23	Temanggung	23,69	16,68	22,24	69,47	68,65	62,59
24	Kendal	47,14	47,80	37,29	42,99	42,77	41,89
25	Batang	29,63	29,75	17,99	56,09	56,09	41,49
26	Pemalang	19,90	21,21	18,47	69,33	99,47	18,03
27	Pekalongan	28,46	20,74	20,45	51,39	41,58	57,31
28	Tegal	25,46	19,54	20,39	63,21	75,76	63,14
29	Brebes	24,89	19,29	24,80	71,88	75,89	51,78

	KOTA						
30	Magelang	16,35	16,45	14,61	79,00	79,44	68,14
31	Surakarta	59,17	43,85	44,56	35,34	45,30	46,92
32	Salatiga	22,92	25,25	22,16	60,31	56,14	52,46
33	Semarang	56,03	61,42	57,40	27,11	30,72	33,23
34	Pekalongan	59,55	52,53	24,08	34,61	36,72	20,61
35	Tegal	24,91	25,45	15,81	71,85	71,89	54,05
Rata-rata :		35,64	33,54	29,61	52,99	56,29	50,91

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1999/2000 - 2001, diolah.

Berkaitan dengan upaya peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi, setidak-tidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam yaitu bagaimana intensitas pemungutannya, peningkatan aparat sebagai sumber daya manusia dan profesionalisme pelaksanaan tugas. Sedangkan ke luar berkaitan dengan pendekatan ke wajib pajak dan masyarakat, dapat dilakukan dengan pembinaan termasuk sistem "jemput bola". Juga sistem-sistem lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut aktif membayar pajak tanpa harus dipaksa, sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Demikian juga untuk pajak dan retribusi yang lain, pemungutannya tergantung dari inisiatif masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan perekonomian tertentu.

Penetapan suatu target juga harus memperhitungkan potensinya dengan cermat. Penetapan berdasarkan pertumbuhan per tahun, besar kemungkinan akan terjadi kebocoran ataupun potensi yang tak tertangani. Untuk itu perlu adanya data potensi yang akurat tentang sumber-sumber pajak dan retribusi tersebut. Misalnya pada retribusi pasar, harus diketahui berapa jumlah pasar yang ada, jumlah kios, jumlah pedagang, aktivitas jam pasar, tarif yang dikenakan, dan lain-

lain. Dari sinilah dapat dilihat potensi yang dapat diandalkan untuk menetapkan target penerimaan daerah yang hendak dicapai.

Seperti dikatakan Miyasto (1998), bahwa kebijakan ekstensifikasi berupa penetapan jenis pajak baru akan cenderung menimbulkan distorsi ekonomi dan gejolak masyarakat dan dunia usaha. Sehingga yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah intensifikasi, dengan harapan akan lebih terarah. Dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, telah membawa implikasi pada perbedaan jenis-jenis pajak daerah yang potensial seperti misalnya pajak sarang burung walet. Oleh karena itu penetapan jenis-jenis pungutan daerah yang seragam untuk seluruh wilayah Republik Indonesia tidak akan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan PAD. Akan lebih optimal bila perencanaan tersebut diserahkan sepenuhnya pada masing-masing daerah. Pemerintah pusat tinggal melakukan pembatasan jumlah maksimum pajak dan retribusi daerah yang dapat digali, agar tidak menimbulkan beban berat pada masyarakat. Beberapa jenis pajak memang akan mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah, disamping elastisitas penerimaannya terhadap PDRB juga tinggi. Oleh karena itu jenis-jenis pajak tersebut, bagi daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, akan memberikan prospek yang baik. Namun dilihat dari sisi kemampuan antar daerah yang masih timpang, jenis-jenis pajak tersebut cenderung diskriminatif dan memihak pada daerah-daerah dinamis yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Daerah-daerah lain yang relatif statis kurang dapat memanfaatkan sumber-sumber penerimaan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, jika jenis-jenis pajak ini digunakan untuk mensubstitusi

jenis pajak lain yang selama ini dianggap potensial oleh daerah, diperkirakan justru akan memperbesar ketimpangan PAD antar daerah.

Dilihat dari jenisnya, Pajak Penerangan Jalan (PJP) kurang memungkinkan untuk usaha intensifikasi, karena sistem pemungutannya sudah ditetapkan berdasarkan tingkat tetap satuan tenaga terpasang yang ditanggung konsumen. Demikian pula untuk jenis pajak lain yang pemungutannya tidak pasti. Analisis tentang pajak dan retribusi, periksa lampiran 9-43. Upaya kebijakan di sektor pajak ini, dapat diawali dengan menentukan potensi apa yang memungkinkan untuk dikerjakan tanpa merusak lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat meningkatkan PAD. Misalnya dengan menggencarkan dan menertibkan pajak reklame, disamping dari hasil kutipannya juga agar supaya suasana terlihat baik dan asri. Jenis pajak ini masih bisa dilakukan peningkatan tarif dengan dasar Perda. Memang biaya pajak reklame merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak, tetapi sebenarnya mereka juga ikut dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan menjaga keindahan. Jika dipandang perlu, dapat juga dilakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk sistem pengelolaan yang lebih baik.

Untuk jenis pajak Hotel dan Restoran, selain berkaitan dengan pemilik juga erat kaitannya dengan PHRI. Jika pengenaan pajaknya dinaikkan, pada umumnya pihak hotel tidak akan langsung menaikkan tarifnya secara drastis. Karena bisnis perhotelan, terutama yang berbintang, berkaitan dengan paket-paket wisata yang dijalin dengan biro perjalanan baik dari dalam maupun luar negeri. Jika ada sedikit gejolak atau kenaikan tarif akan timbul kekacauan, maka untuk

menaikkan tarif ini agak riskan. Sehingga dari pajak hotel dan restoran ini hanya diharapkan dari ketepatan waktu untuk setoran pajak mereka.

Namun di sisi lain, sektor retribusi justru lebih memberikan peluang yang besar, bahkan berpotensi sebagai primadona dalam penerimaan daerah. Untuk memberikan hasil yang optimal, akan lebih baik bila terfokus jenis retribusi jasa umum. Dengan asumsi bahwa retribusi ini menuntut adanya prestasi pemerintah daerah dalam penyediaan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Dampaknya adalah kepuasan konsumen terhadap pengeluaran yang dibayar untuk pelayanan tersebut. Misalnya retribusi pelayanan persampahan, adalah jenis retribusi daerah yang sangat potensial, prospektif dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Di daerah perkotaan akan semakin banyak rumah tangga yang memerlukannya, karena sebagian besar tidak memiliki pekarangan yang cukup untuk mengelola sampah secara pribadi. Biaya pengumpulan retribusi ini dapat relatif kecil apabila dikoordinasikan dengan instansi lain, misalnya menitipkannya pada rekening pembayaran PDAM atau PLN seperti pada pajak penerangan jalan (PJP). Dalam pengelolaan limbah industri secara terpadu, retribusi yang dapat dipungut adalah *impact fee*. Selama ini pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh dunia industri dilakukan secara individual, sehingga biayanya relatif mahal dan kontrolnya juga sangat sulit. Peluang dengan membangun unit pengolahan limbah (UPL) ini belum banyak dilakukan oleh daerah, karena biaya investasinya memang mahal. Namun hasil yang diperoleh akan cukup memadai, karena retribusi ini tidak hanya dikenakan untuk dunia usaha tetapi juga rumah tangga. Jadi dengan kenyataan

adanya ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat, maka harapan untuk dapat menciptakan kemandirian tersebut mungkin akan sulit.

5.2. Analisis Regresi

Untuk mengetahui apakah PAD yang diterima selama ini memang dipengaruhi oleh variabel-variabel Pengeluaran Pembangunan, dan PDRB perkapita, dilakukan analisis regresi. Dalam penelitian ini digunakan model regresi biasa (OLS) dengan menggunakan program Eviews.

Sebagai langkah awal dilakukan pengujian terhadap adanya penyimpangan asumsi klasik. Langkah ini untuk mengetahui apakah data yang diestimasi dengan regresi tersebut hasilnya layak digunakan sebagai model. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi :

1. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan nilai R^2 masing-masing regresi menunjukkan bahwa regresi utama sebesar $R^2_{(\text{LnPAD}, \text{LnPP}, \text{LnPKT})} = 0,388148$, lebih tinggi dibandingkan dibandingkan hasil regresi antar variabel bebas dengan nilai $R^2_{(\text{LnPP}, \text{LnPKT})} = 0,052558$ dan $R^2_{(\text{LnPKT}, \text{LnPP})} = 0,052558$ (lampiran 44a, 44b, dan 45a). Maka mengikuti *rule of thumb* metode korelasi parsial/*examination of partial correlations* (Gujarati, 1999 : 232), dapat disimpulkan bahwa dalam model empiris tidak ditemukan adanya multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dilakukan uji White Heteroskedasticity (Gujarati, 1999 : 356-358). Berdasarkan hasil estimasi (*no cross term*) dapat disimpulkan, bahwa menolak hipotesis yang menyatakan

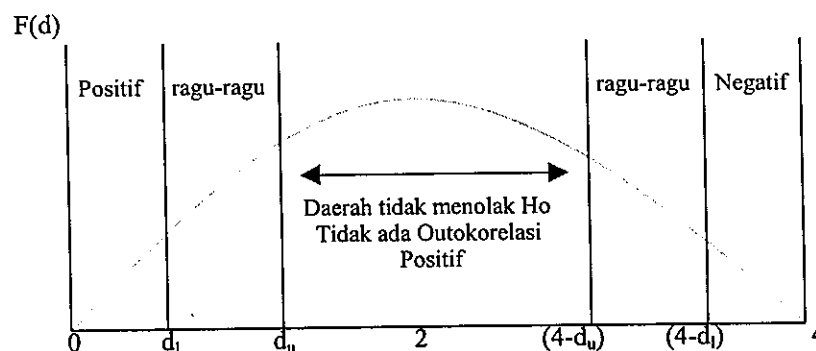
ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan. Hal ini dibuktikan dari nilai $\text{Obs} \cdot R^2 \text{ Squared} = 4,524238$ (df 5% n-k) dengan *degree of freedom* 4, lebih kecil dibandingkan dengan χ^2 tabel (4) dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ (9,48773). Pada bagian lain (*cross term*), nilai $\text{Obs} \cdot R^2$ adalah 6,291582 dengan *degree of freedom* 5, juga lebih kecil dibandingkan dengan χ^2 tabel (5) dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ (11,0705). Hasil analisis selengkapnya lihat lampiran 45b dan 46.

3. Uji Autokorelasi

Dengan adanya autokorelasi maka taksiran tidak bias, tetapi akan terjadi *underestimate* terhadap variannya sehingga prediksinya tidak efisien. Masalah autokorelasi ini biasanya jarang muncul dalam data kerat lintang.

Untuk pengujian autokorelasi ini dilakukan uji *d Durbin-Watson* (DW *d* Test). Hasilnya menunjukkan bahwa dalam model empiris tidak ditemukan adanya autokorelasi positif, karena nilai D-W statistik (2,352992 pada $\alpha = 5\%$) diatas nilai $D_L = 1,343$ dan $D_U = 1,584$ serta dibawah nilai $4 - D_U = 2.461$ dan $4 - D_L = 2.657$ (Gujarati, 1999 : 386-391).

Gambar 5.1.
Statistik *d* Durbin-Watson



probabilitas sebesar 0,000204. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penjelas/bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel tak bebas yaitu PAD. Selain itu dapat pula dilihat dari nilai F hitung atau F statistik dibandingkan dengan F tabel. Dengan nilai F statistik dari regresi sebesar 11,21451, jauh lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,29 (pada $\alpha = 5\%$ $df = 5/33$).

2. Uji parameter individual (uji t)

Berdasarkan tabel 5.5. pada kolom probabilitas diatas, diperoleh hasil bahwa kedua variabel penjelas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Semua variabel tersebut mempunyai probabilitas dibawah tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 5%. Demikian pula jika dilihat dari t statistik hasil analisis regresi secara individu, nilai t statistik variabel PP (3,291639) dan PKT (2,559699) lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,696 (pada $df = 33$ $\alpha = 5\%$). Probabilitas kedua variabel tersebut sebesar 0,0024 dan 0,0154, yang berarti sudah signifikan pada derajat 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel PP dan PKT mempunyai hubungan yang signifikan terhadap PAD.

3. Koefisien determinasi (R^2)

Nilai R^2 statistik digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan model dalam memprediksi nilai variabel tak bebas. Atau untuk melihat berapa besar pengaruh variabel-variabel penjelas/bebas tersebut secara bersama-sama. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh R^2 sebesar 0,412078 berarti bahwa sekitar 41% dari variasi dapat dijelaskan oleh Pengeluaran Pembangunan dan PDRB

per kapita. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai tersebut memang tampak rendah, karena pada umumnya nilai R^2 yang dihasilkan dari data kerat lintang adalah relatif rendah, karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2001 : 42).

Selanjutnya analisis secara ekonomi terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi PAD adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan (PP).

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel PP berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PAD. Artinya pengeluaran pembangunan mampu mempengaruhi penerimaan PAD. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan regresi, dengan koefisien regresi variabel PP sebesar 0,290011.

Dengan asumsi jika pengeluaran pembangunan ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, diharapkan akan mampu mendorong kegiatan perekonomian. Artinya apabila pengeluaran pembangunan meningkat, akan mendorong agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga akan meningkat. Hal ini juga didukung hasil penelitian Arief (2001), bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Sesuai dengan hasil perhitungan regresi, maka dengan koefisien sebesar 0,290011 tersebut artinya apabila terjadi kenaikan pengeluaran pembangunan

sebesar 1 (satu) persen, maka akan PAD akan meningkat sebesar 0,29%. Peningkatan pengeluaran pembangunan ternyata signifikan dan positif mempengaruhi penerimaan PAD. Hal ini terbukti dari fluktuasi nilainya yang seiring dengan penerimaan PAD. Pada saat pengeluaran pembangunan menurun (tahun 2000), maka PAD juga menurun. Begitu pula pada tahun 2001, saat PAD meningkat ternyata pengeluaran pembangunan juga meningkat (lampiran 2). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan pengeluaran pembangunan dengan prioritas pada sektor-sektor potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor tersebut antara lain Sektor Pertanian Sektor Jasa-jasa dan Sektor Bangunan ; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ; Sektor Pertambangan dan Galian ; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan sektor Listrik, Gas dan Air Minum (lampiran 47).

2. Pengaruh PDRB Perkapita (PKT).

PDRB per kapita merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Setidak-tidaknya dari PDRB per kapita pada tabel 4.3. dimuka, menunjukkan bahwa fluktuasi tersebut searah dengan kenaikan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Tidak jauh berbeda dengan pengeluaran pembangunan, maka variabel PDRB per kapita juga berpengaruh positif terhadap PAD dengan koefisien regresi sebesar 0,279229. Dengan kata lain, apabila terjadi kenaikan 1 (satu) persen PDRB per kapita, maka akan menyebabkan PAD meningkat sekitar 0,28%.

Selama periode tahun 1999/2000-2001 PDRB per kapita menunjukkan peningkatan. Tahun 1999/2000 dari Rp. 1.348.447,05 menjadi Rp. 1.389.752,14 pada tahun 2000 (naik 3,06%). Kemudian pada tahun 2001 meningkat lagi dengan nilai Rp. 1.425.163,72 (naik 2,55%). Kenaikan PDRB per kapita tentu saja berkaitan dengan jumlah penduduk dan PDRB itu sendiri. Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2000 sebesar 0,05% dan tahun 2001 sebesar 0,94%. Sedangkan pertumbuhan PDRB harga konstan tahun 2001 sebesar 3,93% dan 3,33% pada tahun 2001. Terlihat bahwa pertumbuhan PDRB lebih cepat sehingga PDRB per kapita juga meningkat. Hal ini semakin membenarkan terhadap hipotesa bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap PAD.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pengamatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dilandasi teori, tujuan dan hipotesis penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisa terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) :

DDF a (Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah), cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1999/2000 sebesar 10,88%, tahun 2000 sebesar 10,66% dan tahun 2001 turun lagi menjadi 7,29%. Sedangkan untuk DDF b (Rasio PAD + Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah), menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 1999/2000 sebesar 18,61%, kemudian pada tahun 2000 naik menjadi 14,66% dan pada tahun 2001 turun lagi menjadi 12,52%. Dua indikator DDF tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang rendah. Meskipun secara absolut PAD tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, namun karena penerimaan lain di luar PAD tersebut juga meningkat, bahkan lebih besar, maka porsi PAD tersebut terlihat semakin kecil.

Selanjutnya pada DDF c (Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran Rutin) juga menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 1999/2000 sebesar 14,28%, tahun 2000 sebesar 14,66% dan tahun 2001 sebesar 11,14%. Demikian juga untuk DDF d (Rasio PAD + Bagi Hasil terhadap Total Pengeluaran Rutin). Pada

tahun 1999/2000 sebesar 23,83%, tahun 2000 sebesar 26,82% dan tahun 2001 turun lagi menjadi 19,13%.

Pada dua indikator DDF c dan DDF d diatas, menunjukkan indikasi bahwa kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin inipun juga masih memerlukan adanya bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi (Pusat dan Propinsi).

Besar kecilnya PAD tersebut terkait erat dengan penerimaan daerah di sektor pajak dan retribusi. Meskipun penerimaan kedua sektor tersebut meningkat, namun mobilitasnya mengalami penurunan, sehingga berdampak pada kemandirian daerah. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja melalui PAD.

2. Analisis regresi (elastisitas) :

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pembangunan (PP) dan PDRB perkapita (PKT) berpengaruh positif terhadap PAD. Artinya setiap terjadi perubahan pada ke dua variabel independen tersebut, maka variabel dependen akan mengalami perubahan sebesar koefisien dan searah. Hasil estimasi regresi menunjukkan besarnya koefisien regresi pengeluaran pembangunan yaitu sebesar 0,290011 dan 0,279229 untuk PDRB per kapita. Apabila terjadi kenaikan 1% pada masing-masing variabel, akan meningkatkan PAD sebesar koefisien tersebut yaitu 0,29% untuk pengeluaran pembangunan, dan 0,28% untuk PDRB per kapita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pembangunan (PP) dan variabel PDRB per kapita (PKT) bersifat inelastis terhadap PAD. Artinya kenaikan pada masing-masing variabel tersebut tidak seimbang dengan kenaikannya terhadap PAD. Dengan kata lain dua variabel tersebut tidak atau kurang peka sehingga kurang bagus bila digunakan untuk memprediksi pengaruh besar kecilnya PAD.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dilihat bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dari segi kemampuan keuangan masih kurang, sehingga saran yang dapat penulis usulkan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan pengeluaran pembangunan dengan prioritas pada sektor-sektor potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor tersebut antara lain : Pertanian; Jasa-jasa; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Pertambangan dan Galian; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan ; serta Listrik, Gas dan Air Minum. Diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui peningkatan PAD.
2. Masyarakat harus selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bersifat membangun. Untuk itu sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah harus benar-benar dikembangkan.

6.3. Limitasi.

Penelitian ini masih membatasi pada masalah yang bersifat agregatif, karena variabel Pengeluaran Pembangunan dan PDRB per kapita tersebut sebenarnya tidak langsung berpengaruh terhadap PAD. Jadi masih terdapat *interprening variabel* yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, akan lebih rinci jika difokuskan pada satu lokasi (kabupaten/kota), sehingga implikasi kebijakannya tidak bersifat universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, "Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia", **JEBI** Vol. 16, No. 4, 2001.
- Alfian Lains, "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", **PRISMA**, No. 4, 1985.
- Arief Hadiono, 2001, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, Tesis S-2 MEP UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Booth, Anne., "Pendanaan Pemerintah Pusat Dalam Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah", **PRISMA** nomor 1 Januari 1988, 65-78.
-, 2000, Upaya-upaya Untuk Mendesentralisasikan Kebijakan Perpajakan : Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, **Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan** (rangkuman Colin MacAndrews & Ichlasul Amal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- BPS Propinsi Jawa Tengah, "Jawa Tengah Dalam Angka, 2002.
- BPS Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, "Statistik Keuangan Daerah" 1999/2000-2001.
- Davey K.J., 1988, "Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga", Penerbit UI-Press.
- Devas, Nick, dkk, 1989, "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", Penerbit UI-Press.
- Departemen Dalam Negeri, 1991, "Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab", Litbang Depdagri, Jakarta.
-, 1982, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), Jakarta.
- Diah Lutfi Wijayanti, 2001 "Sektor-Sektor Ekonomi Potensial dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah : DIY", Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

- Dhiratanayakiant, K., "Rural Service Centres Local Government and Financial Autonomy : The Case of Thailand (Kammeier and Peter Swan, Equity With Growth? Planning Perspective for The Small Towns in Development Countries), Asia Institute of Technology, Bangkok, 1984, 352.
- Ellia Radianto, "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku", **PRISMA** nomor 3, 1997.
- FX. Sugiyanto, "Kemandirian dan Otonomi Daerah", **Media Ekonomi dan Bisnis**, Vol. XII, No. 1 Juni 2000.
- Gunawan Sumodiningrat, 1994, **Ekonometrika Pengantar**, BPFE Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar, 1999, **Essentials of Econometrics**, second edition, Irwin McGraw-Hill.
- Gujarati, Damodar, **Ekonometrika Dasar**, Terjemahan Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Guritno Mangkoesobroto, 2001, **Ekonomi Publik**, BPFE Yogyakarta.
- Hadi Sasana, 2001, "Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten", Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Herman Haeruman Js., "Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah", 25 Tahun **PRISMA** 1971-1996.
- H. Miyasto, "Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah", **Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik**, Vol. 2 (4) Oktober 1998.
- Imam Ghozali, 2001, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Josef Riwo Kaho, 1997, "Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia", cetakan keempat Rajawali Press, Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 1999, **Ekonomi Pembangunan**, Edisi Keempat, STIE YKPN, Yogyakarta.
- LP2I Semarang dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, 2000, "Penyusunan Data Potensi Dan Kemandirian Daerah-Daerah Propinsi Jawa Tengah".

- Mahi, Raksasa, Karyaman Muchtar, Thia, Jasmina, dan Cita Wignyoseptina, 2000, **Kebijakan Desentralisasi dalam Masa Transisi**, LPEM FE-UI, Jakarta.
- Miller, SM dan Russek, FS, "Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level", **Public Finance Review**, Vol. 25 No. 2, March 1997, 213-237, Sage Publications, Inc.
- Mudradjat Kuncoro, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan", **PRISMA**, nomor 4, 1995, Jakarta.
-, 1997, **Ekonomi Pembangunan : "Teori, Masalah dan Kebijakan"**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Musgrave R.A and Musgrave P.B, 1993, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- No name, "**Modul : Latihan Ekonometrika Dasar**", Program Magister Sains, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2001.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, "**REPETADA PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002**".
- Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
-, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
-, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Richard, L.H.Tumilar, 1997, "Otonomi Keuangan dan Ekonomi Dati II di Propinsi Sulawesi Utara", **Thesis**, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Rita Engleni, **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang**, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2001.
- Sadono Sukirno, 1994, **Pengantar Teori Makroekonomi**, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 1999, **Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Smith, Roger S., "Financing Cities in Developing Countries," **International Monetary Fund Staff Paper**, Vol. 7. No. 21, hal. 342-344.
- Suahasil Nazara, "Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia", **PRISMA**, 3 Maret 1997.
- Sukanto Reksohadiprojo, 2000, **Ekonomika Publik**, BPFY Yogyakarta.
- Suparmoko, 2002, **Ekonomi Publik : "Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah"**, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suparmoko, 1994, **Keuangan Negara : "Dalam Teori dan Praktek"**, BPFY Yogyakarta.
- Susiyati B. Hirawan, 1987, "Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional : Keuangan Daerah di Indonesia", **Badan Otonom Economica bekerja sama dengan LPFE-UI Jakarta**.